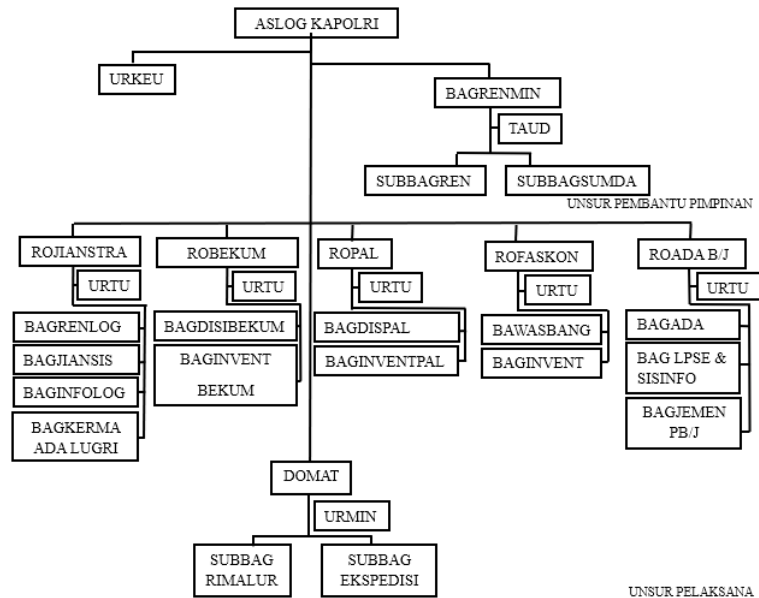


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Slog Polri

2.1.1 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Staf Logistik Polri

Sumber: Buku Rencana Strategis Slog Polri 2025-2029

Slog Polri berfungsi sebagai unsur pengawas dan pendukung langsung di bawah Kapolri, dengan tugas utama membina serta mengelola logistik di lingkungan Polri. Dalam menjalankan fungsinya, Slog Polri terbagi ke dalam beberapa biro dan bagian yang memiliki peran khusus. Sebagai berikut;

1. Biro Pengkajian dan Strategi mengawasi Bagian Perencanaan Logistik, Bagian Pengkajian Sistem, Bagian Informasi Logistik, dan Bagian Kerjasama Pengadaan Luar Negeri, dimana masing-masing memiliki subbagian yang

menangani aspek perencanaan, sistem dan metode, informasi, serta kolaborasi internasional dalam pengadaan logistik Polri.

2. Biro Perbekalan Umum (Bekum) mengurus distribusi dan inventarisasi bekal umum seperti makanan, pakaian dinas, serta alat tulis kantor. Robekum mencakup Bagian Distribusi dan Bagian Inventarisasi, yang masing-masing membawahi subbagian administrasi, kontrol distribusi, makanan dan bahan bakar, serta penghapusan barang.
3. Biro Peralatan (Ropal) bertanggung jawab atas pengelolaan peralatan, persenjataan, dan kendaraan operasional Polri. Struktur Ropal meliputi Bagian Distribusi dan Bagian Inventarisasi, yang berperan dalam administrasi distribusi, perbengkelan, serta pengendalian materiil peralatan.
4. Biro Fasilitas dan Konstruksi (Faskon) menjalankan pengawasan, inventarisasi, serta pembangunan dan perawatan fasilitas atau infrastruktur kepolisian. Rofaskon memiliki Bagian Pengawasan Bangunan dan Bagian Inventarisasi dengan subbagian teknis yang mengelola pengawasan, analisis, evaluasi, dan kontrol fasilitas.
5. Biro Pengadaan Barang/Jasa (Roada B/J) berperan dalam proses pengadaan Polri. Biro ini terdiri dari Bagian Pengadaan, Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi, serta Bagian Manajemen Barang/Jasa, dimana masing-masing memiliki subbagian yang menangani strategi pengadaan, eksekusi, evaluasi, layanan LPSE, standarisasi sistem, serta pengembangan sumber daya manusia pengadaan.

6. Depo Materiil bertugas menerima, menyalurkan, dan mengekspedisi materiil logistik.
7. Bagian Perencanaan dan Administrasi menangani perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta administrasi internal.
8. Urusan Keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian keuangan logistik Polri.

2.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Slog Polri

Visi mencerminkan arah dan harapan yang dituju, serta memberikan panduan strategis untuk mencapainya. Visi Slog Polri adalah tercapainya manajemen logistik Kepolisian yang efisien dan modern untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Aman, Tertib, dan Berkeadilan.

Makna dari Visi Slog Polri, yaitu:

1. Slog Polri menyiapkan tata kelola rencana pengadaan dan penyediaan Almatsus, Sarana, dan Prasarana Polri yang modern untuk mendukung peran Kepolisian sebagai penegak hukum dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Slog Polri, melalui tugas fungsinya, diharapkan mampu mengorganisir manajemen logistik kepolisian berdasarkan prioritas dan kebutuhan Sarana Prasarana dalam pemenuhan Almatsus Polri.
3. Slog Polri dalam penyediaan Almatsus dan Sarana Prasarana Polri berusaha mengembangkan teknologi modern sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ekspektasi masyarakat serta pemangku kepentingan,

dengan fokus pada adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan dan tantangan dalam operasional kepolisian.

4. Slog Polri mendukung peningkatan kualitas layanan publik Polri kepada masyarakat melalui perencanaan kebutuhan minimum maupun pemenuhan kebutuhan ideal Almitsus dan Sarana Prasarana Polri berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selanjutnya, untuk mendukung dan memastikan tercapainya Visi Slog Polri, dirumuskan pernyataan misi. Misi adalah pernyataan yang mendefinisikan aktivitas yang sedang atau akan dilakukan serta target yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Dalam konteks ini, Misi Slog Polri adalah Pengoptimalan modernisasi operasional logistik Kepolisian yang adaptif, modern, dan efisien.

Makna dari Misi, yaitu:

1. Modernisasi operasional logistik Polri secara keseluruhan diharapkan mampu mengorganisir manajemen logistik yang adaptif, modern, dan efisien, tidak hanya beroperasi dengan baik tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat dalam mendukung tugas fungsi Kepolisian.
2. Modernisasi operasional logistik Polri ditandai dengan rasionalisasi rencana kebutuhan organisasi, termasuk pemanfaatan teknologi terkini dalam menjalankan tugas operasional sesuai fungsi kepolisian.
3. Mengoptimalkan perencanaan kebutuhan logistik melalui kajian analisis penyediaan logistik yang modern dan tepat sasaran, meningkatkan standar

mutu penyediaan Almatsus, perbekalan, dan fasilitas konstruksi Polri, serta mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa Polri yang transparan dan bertanggung jawab.

Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Slog Polri, disusunlah Tujuan Slog Polri, yaitu:

1. Mengembangkan Almatsus dan Sarana Prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan dinamika dan tantangan.
2. Meningkatkan kualitas data informasi logistik yang akurat dan akuntabel dalam mendukung operasional Kepolisian.
3. Meningkatkan tata kelola, sumber daya, dan sistem pengelolaan pengadaan barang/jasa Kepolisian.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Slog Polri

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Slog Polri memiliki beberapa fungsi strategis yang saling berkaitan dan membentuk sistem logistik kepolisian yang terpadu, yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan dan penyusunan anggaran untuk pemeliharaan serta perawatan personel dan logistik, pengorganisasian manajemen personel dan logistik, serta penanganan administrasi dan urusan internal di Slog Polri.
2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Logistik Polri, pengkajian, perumusan, pengembangan sistem dan metode serta standarisasi Logistik Polri.
3. Kerjasama pengadaan luar negeri; penyelenggaraan informasi Logistik Polri.
4. Manajemen logistik materiil bekal umum (Bekum).

5. Manajemen logistik materiil peralatan (Pal).
6. Pembinaan teknis fasilitas dan konstruksi (Faskon) baik yang bersifat terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan.
7. Manajemen pergudangan serta pelaksanaan *stock opname* materiil persediaan.
8. Administrasi, pelaporan, dan pengendalian keuangan.

2.2 Pengadaan Barang/Jasa Slog Polri

Sebelum era digital, proses akuisisi barang dan jasa di Polri mengandalkan metode konvensional yang menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran, rendahnya efisiensi, serta kesulitan dalam pelacakan akuntabilitas publik. Kesadaran bahwa sektor akuisisi rentan penyimpangan mendorong Polri melakukan reformasi institusional untuk menciptakan sistem transparan, akuntabel, dan efisien melalui pembentukan Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Polri melalui Keputusan Kapolri Nomor Kep/2212/XI/2019, diperkuat Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2022.

Transformasi digital diperkuat implementasi aplikasi pengadaan barang/jasa di Slog Polri menggunakan E-Tendering dan E-Katalog serta pengembangan aplikasi internal Layanan Pengadaan Barang/Jasa (LPBJ) oleh Slog Polri, diterapkan penuh sejak 2025. Aplikasi ini adalah *platform E-Procurement* yang mengintegrasikan tahapan akuisisi dari perencanaan hingga pelaporan seperti E-Katalog dan E-Tendering namun internal untuk Polri (Mabes dan Polda) dengan pemasok terverifikasi oleh LPSE Polri.

Dalam melaksanakan pengadaan rutin, Slog Polri memanfaatkan E-Katalog untuk pembelian langsung dari pemasok tersertifikasi, mempercepat proses dan memangkas birokrasi. Sedangkan untuk pengadaan strategis dan kompleks menggunakan E-Tendering dan LPBJ. Kolaborasi E-Tendering, E-Katalog, dan LPBJ mendigitalisasi sistem akuisisi Slog Polri, mendukung transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta kontribusi pada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa.

Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Etalase Produk, Produk, dan Penyedia

Tahun	Jumlah Etalase Produk	Jumlah Produk	Jumlah Penyedia
2023	8 Etalase	45.279 Produk	1.084 Penyedia
2024	8 Etalase	83.423 Produk	1.768 Penyedia

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Sejak 2023, Polri menerapkan strategi pengurangan impor sistematis untuk tingkatan belanja PDN dan partisipasi UMK-KOP. Strategi meliputi alokasi 40% anggaran untuk PDN dan UMK-KOP, serta perluasan katalog elektronik sektoral. Polri menambah empat kategori dan 27 subkategori, menggelar sosialisasi sertifikasi TKDN, perhitungan nilai TKDN, dan bimbingan operator SIRUP.

Hasil terlihat peningkatan tiap tahun, di 2023 jumlah katalog delapan etalase, 45.279 produk dari 1.084 pemasok lokal dan di 2024 jumlah katalog stagnan di delapan etalase tetapi mengalami kenaikan di 83.324 produk, 1.768 pemasok. Hal ini menunjukkan proporsi PDN dari di bawah 50% menjadi lebih tinggi melalui intervensi, meningkatkan partisipasi lokal, basis TKDN, efisiensi, dan kemandirian. Ini selaras dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan target 40% belanja PDN.



Gambar 2. 2 Polri Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sebanyak 11 Kali Berturut-turut dari BPK RI

Sumber: Tualnews.com, 2024

Gambar menunjukkan keberhasilan pengadaan barang/jasa Slog Polri terlihat dari pemberian WTP dari BPK RI 11 kali berturut-turut hingga 2024, menunjukkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel. Konsistensi ini membangun kepercayaan publik dan membuktikan efektivitas. Namun, akuisisi Slog Polri menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, terdapat beberapa kekuatan strategis seperti distribusi personel logistik yang merata dari tingkat Mabes hingga Polsek, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta adanya tunjangan kinerja dan remunerasi yang mendorong profesionalitas kerja. Disisi lain, terdapat kelemahan seperti keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kewilayahan, keterbatasan anggaran, SDM yang belum sepenuhnya kompeten, dan indikasi korupsi gas air mata.

Di sisi eksternal, kemajuan teknologi informasi membuka peluang bagi Polri untuk memperkuat sistem pengadaan berbasis digital dan transparan, termasuk

pengembangan konsep *green logistics* yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, peluang ini juga disertai ancaman seperti keterbatasan peralatan dalam menghadapi situasi darurat berskala besar, hambatan geografis Indonesia yang luas, potensi perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada jadwal pengadaan, serta meningkatnya risiko kejahatan siber yang dapat menyerang sistem LPBJ.

2.3 Implementasi E-Katalog di Slog Polri

Slog Polri telah menerapkan sistem *E-Purchasing* melalui E-Katalog berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diperkuat oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi E-Katalog di Slog Polri berhasil memenuhi kebutuhan umum dan rutin seperti perlengkapan dinas. Sebagai berikut:

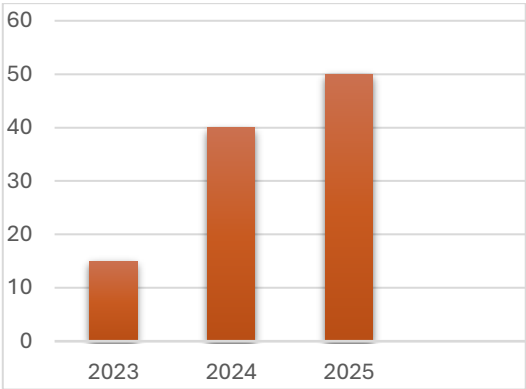
Tabel 2.2 Kategori dan Subkategori Produk Perlengkapan Dinas Polri

No.	Kategori	Sub Kategori
1.	Pakaian Dinas Harian, dan Pakaian Dinas Lapangan	1. Pakaian Dinas Harian Polri Pria
		1. Pakaian Dinas Harian Polri Wanita
		2. Pakaian Dinas Lapangan II <i>Two Tone</i> Polri Pria
		3. Pakaian Dinas Lapangan II <i>Two Tone</i> Polri Wanita
		4. Pakaian Dinas Lapangan II <i>Two Tone</i> Polri Berhijab

2.	Sepatu Dinas Harian dan Sepatu Dinas Lapangan	1. Sepatu Dinas Lapangan Untuk Pati
		2. Sepatu Dinas Lapangan Untuk Pamen, Pama, Brigadir, dan Tamtama
		3. Sepatu Dinas Harian Polri
		4. Sepatu Dinas Harian Polwan
3.	Topi Lapangan	1. Topi Lapangan Untuk Pati
		2. Topi Lapangan Untuk Pamen
		3. Topi Lapangan Untuk Pama

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Tabel menunjukkan bahwa implementasi E-Katalog di Slog Polri fokus pada produk utama yang rutin dan operasional, seperti seragam dinas, perlengkapan operasional, jasa perawatan kendaraan dan bangunan, serta kebutuhan logistik harian lainnya.



Gambar 2. 2 Tren Peningkatan Penggunaan E-Katalog dalam PBJ Slog Polri

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Data menunjukkan implementasi E-Katalog di Slog Polri mengalami tren positif, terbukti dari peningkatan paket dari 54 menjadi 65 antara 2024 dan 2025, serta kenaikan nilai akuisisi hampir 4,4%, yang mengindikasikan dorongan kuat terhadap adopsi E-Katalog di Slog Polri. Namun, terbatas pada jenis umum atau non-strategis.